

**ARTIKEL**

**PERILAKU POLITIK PEMILIH PADA PEMILIHAN KEPALA**

**DAERAH DI DI KOTA MADIUN**

( Studi pada perilaku pemilih pada pilkada di Kota Madiun )



**Oleh :**

**Agus Prasetya**

**S. Adi Suparto**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS TERBUKA**

**2013**

# **PERILAKU POLITIK PEMILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA MADIUN**

( Studi pada perilaku pemilih pada pilkada di Kota Madiun )

## **ABSTRAK**

Fakta sosial menunjukkan bahwa proses demokrasi lokal yang seharusnya berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan tujuannya yaitu untuk meningkatkan partisipasi politik rakyat / masyarakat untuk memilih pemimpinnya ternyata belum membuahkan hasil yang maksimal. Dimana para elite politik lokal dan partai melakukan polarisasi pendukungnya dalam menentukan pilihan calon wali kota dan wakilnya dengan berbagai cara. Sehingga menimbulkan perilaku politik pemilih yang tidak murni dari hati nuraninya tetapi dipaksakan agar memilih sesuai dengan kehendak pimpinannya dengan imbalan tertentu. Pemilihan Kepala daerah sebagai kegiatan politik lokal dilaksanakan dengan berdasarkan Undang-undang No 22 tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU No.32/ tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang di dalamnya mengatur tentang pengaturan pemilihan kepala daerah yang dijabarkan dalam PP No. 6/ 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, serta dalam pemberhentian kepala daerah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana fokus penelitiannya menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa ucapan, atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, perilaku, yang dapat diamati dari para pemilih. Tehnik pengambilan data penelitian ini dengan tehnik wawancara mendalam (*indepth interview*) melalui *snowball* pada pemilih yang ada di daftar pemilih tetap. Untuk mendukung pelaksanaan penelitian, peneliti menggunakan kajian teori antara lain, teori pertukaran Sosial, teori Perilaku Sosial dan teori tindakan Sosial. Teori - teori tersebut sangat relevan dengan permasalahan yang menjadi kajian karena menyangkut tentang perilaku sosial, tindakan sosial manusia dan pertukaran sosial yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Madiun.

Faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih dalam pemilihan kepala kota Madiun antara lain yakni, identifikasi kandidat calon, identifikasi partai pendukung, agama, modal sosial calon, modal ekonomi calon, program calon, visi, misi calon, juru kampanye, issue-issue pribadi calon, dan politik uang, modal sosial dan modal ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa subyek penelitian yang terdiri dari pemilih, masyarakat, guru, direktur PTS, LSM, dosen memberikan jawaban bahwa kemenangan Pilkada tanggal 29 Agustus 2013 oleh pasangan Baris dari Partai Demokrat, PKB, PAN karena faktor modal sosial, modal ekonomi dan adanya indikasi hibah politik. Calon kandidat lain kalah dalam Pilkada sebab minimnya modal sosial dan modal ekonomi serta pengalaman berpolitik. Komposisi perolehan suara sesuai rapat pleno KPUD Kota Madiun 9-September 2013 antara lain sebagai berikut : Baris: 49.50, Pari : 33.50%, Top Care: 2.50%, Awan-19:7.6%, Murni : 6.30% dan ARH 1.95%.

Kata kunci : Pilkada, Perilaku sosial, pemilih, modal sosial, modal ekonomi.

## 1. Pendahuluan

Latar belakang.

Pemilihan umum kepala daerah sebagai kegiatan politik lokal di daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1999, kemudian direvisi dengan Undang-undang No 32/2004 tentang pemerintahan daerah yang didalamnya mengatur tentang pemilihan kepala daerah. Kemudian dijabarkan dalam PP No. 6 /2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala daerah. Termasuk didalam nya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang NO. 3/2005 tentang perubahan atas UU No.32/2004 dan PP No. 17/2005 tentang perubahan atas PP.No.6/2005.

Fakta sosial menunjukkan bahwa proses demokrasi lokal yang seharusnya baik dan benar sesuai dengan tujuannya yaitu meningkatkan partisipasi politik rakyat untuk memilih pemimpinnya ternyata belum membuahkan hasil yang maksimal dimana para elite politik lokal dan partainya melakukan polarisasi pemilih dalam penentuan calon wali kota maupun wakil wali kotanya. Polarisasi pemilih, sudah barang tentu menunjukkan hakekat demokrasi yang hakiki dan kedewasaan dalam proses pemilihan kepala daerah. Proses yang nampak adalah demobilisasi massa dan rekayasa sosial politik elite politik partai, sehingga perilaku politik masyarakat berkualitas dan cenderung tidak rasional.

Perilaku politik (*politik behaviour*) adalah perilaku politik yang dilakukan insan individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajiban sebagai insan politik. Setiap individu diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak, kewajiban guna melakukan perilaku politiknya. Dalam pemilihan umum kepala daerah diseluruh Indonesia terindikasi adanya politik uang oleh calon pimpinan daerah hal tersebut menunjukan perilaku menyimpang dari pemilih walaupun bukti-bukti sulit dibuktikan, sehingga hasil pemilu tetap sah secara hukum.

Pada tahun 2014, sesuai pleno KPU direncanakan pemilu nasional untuk memilih presiden, DPR/MPR, dan pada tahun 2013 seluruh pilkada di tingkat Kab/Kota serta propinsi harus sudah melaksanakan pilkada. Informasi di masyarakat banyak issue yang berkembang tentang mentalitas perilaku pemilih, ketidakjujuran pemilih. Perbuatan menyimpang, seperti politik uang, pembelian kursi, jual beli jabatan posisi jabatan karena pilkada, ada penggelontoran uang oleh calon kepala daerah, calon anggota DPR/MPR untuk para pemilih, bahkan ada yang fantastik.

Pada waktu pemilihan umum daerah pertama tahun 2009 an, banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena berbarengan dengan terjadi ketidakfahaman dalam melaksanakan prosedur penggunaan hak pilihnya/nyoblos sehingga terjadi kekacauan yang menyebabkan banyak pemilih yang keliru dalam menggunakan hak pilihnya. Hal tersebut berdampak pada kualitas pemilu dalam sesuai yang digendakan pemerintah menurut undang-undang No. 22./ tahun 2002.

Terdapat empat alasan penting mengapa perilaku politik pemilih pada saat pilkada langsung perlu dikaji secara mendalam, di era otonomi daerah, (1) merupakan pilkada langsung

di era otonomi daerah yang perlu dicermati dalam rangka terwujudnya sendi-sendi demokrasi. Dan sebagai barometer politik, sosial ekonomi, demokrasi di otonomi daerah sedang dicermati sehingga pelaksanaan pilkada yang aman, damai, jujur, demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia sangat penting sangat diperlukan. Sebab ada *issue* pemikiran sebagian orang untuk mengembalikan demokrasi seperti jamannya orde baru, mengingat era otonomi daerah ada konflik komunal, menimbulkan raja-raja kecil di daerah dan adanya politik uang, korupsi, kerusuhan dalam pilkada karena belum siap menang dan kalah dalam pilkada.(2) Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat ***heterogenitas*** dalam soal budaya lokal seperti banyaknya suku bangsa yang sangat pluralis/majemuk. Hal ini mempunyai tingkat kompetitif yang tinggi. Sehingga pilkada dalam era otonomi daerah sekarang mudah sekali terjadi konflik yang, sektarian, sara sebagai hasil pilkada. Hal tersebut disebabkan belum matang mental demokratis rakyat di era otonomi daerah. Dan (3) muncul politik uang dari calon-calon pemimpin daerah dalam pilkada, dan belum adanya audit modal / keuangan para calon pimpinan daerah dalam pilkada secara transparan. Sehingga politik uang menjadi faktor yang mewarnai pelaksanaan pilkada selama ini, figur calon baik berkualitas dapat kalah dengan adanya politik uang, hal inilah yang membuat demokrasi di era sekarang menjadi kotor dan tidak berkualitas.(4) Pelaksanaan pilkada saat ini masih menyisakan pekerjaan rumah yang memprihatinkan kaitannya dengan sendi-sendi demokrasi sebagaimana dengan maksud dan tujuan awal dari otonomi daerah. Dengan perilaku pemilih dan calon pimpinan daerah yang menyimpang membuat demokrasi yang digadang-gadang sebagai suara rakyat akhirnya gagal total karena perilaku politik pemilih dan calon pimpinan daerah yang menyimpang, curang menciderai demokrasi.

## **B. Permasalahan**

1. Apakah factor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik pemilih kepala daerah dalam pilkada di kota Madiun 2013.
2. Apakah modal social dan modal ekonomi calon walikota/wawalikota menjadi preferensi pemilih untuk menentukan calon.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Konsep Perilaku Politik Pemilih.**

Perilaku Politik adalah perilaku yang dilakukan oleh insan atau individu kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Seorang individu atau kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan fungsi sosial politik, hak dan kewajibannya guna menyalurkan aspirasi politik. Yang dimaksud dengan perilaku politik adalah (Chaplin, 1993) : (1) Melakukan pemilihan untuk memilih calon pemimpin wakil rakyat. (2) Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik, mengikuti ormas atau LSM.(3)

Ikut serta dalam pesta politik. (4) Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas. (5) Berhak mejadi calon pimpinan politik. (6) Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan yang berlaku.

Secara bebas perilaku politik adalah diartikan keseluruhan tingkah laku politik para aktor politik dan warga negara yang dalam manivestasi konkritnya telah saling memiliki hubungan dengan kultur. Sikap-sikap warga negara, respon dalam menilai terhadap obyek dan peristiwa politik maupun aktifitasnya terhadap sistem politik yang ada saat ini sangat dipengaruhi pula oleh perilaku elite politik yang memerintah maupun kehidupan sosial budaya masyarakat. (Almond dan Powell dalam Kanta prawira, 1985 :26).

Perilaku politik (*political behaviour*) dinyatakan sebagai suatu telaah mengenai tindakan manusia dalam situasi politik. Interaksi antara pemerintah dan masyarakat, serta antara lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat, antara kelompok dan individu yang ada dimasyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik.

Dalam hal ini ada dinamika antara pihak pemerintah atau elit politik, ada yang mentaati pemerintah, yang satu mempengaruhi dan yang lain kecewa karena janji yang tidak dapat dipenuhi, berunding dengan tawar menawar, yang satu memaknai keputusan, berhadapan pihak lain yang mewakili kepentingan rakyat berusaha membebaskan, yang satu menutup kenyataan yang sebenarnya. Pihak lain berupaya memaparkan kenyataan sesungguhnya, mencemarkan apa yang akan terjadi, semuanya itu merupakan wujud-wujud perilaku politik (carr, 1951 : 154 ).

Tindakan dan perilaku politik individu ditentukan oleh pola orientasi umum yang tampak secara jelas sebagai pencerminan budaya politik. Segala sesuatu bentuk ucapan, pernyataan, tingkah laku, bahkan, mitos sekalipun sebenarnya dapat diungkapkan sebagai akibat pola dan budaya politik. Dengan demikian segala sesuatu perilaku seseorang aktor politik merupakan para meter dalam melihat bagaimana sikap individu itu bergaul dan berkumpul.

Aktor-aktor politik menurut surbakti (1992:57) dapat dibagi menjadi 2 (dua) yakni: (1) bertipe pemimpin yang mempunyai tanggung jawab atau tugas dan kewenangan untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik. (2) Warga masyarakat biasa yang mempunyai hak dan kewajiban untuk mengajukan tuntutan serta dukungan terhadap aktor politik bertipe pertama, termasuk mengajukan aspirasi, kepentingan atau mengajukan alternatif putusan berlainan dengan keputusan yang telah dibuat aktor politik tipe pertama.

Salah satu substansi dasar yang berkaitan dengan perilaku politik adalah pendekatan tingkah laku politik lebih menjadi titik sentral perhatian dari pada lembaga-lembaga politik atau kekuasaan dan keyakinan politik. Hal ini disebabkan oleh tingkah laku politik pemilih

merupakan pencerminan dari budaya politik masyarakat yang sarat dengan aneka macam bentuk karakter dan aneka bentuk kelompok dengan aneka macam perilakunya. Perilaku politik tidak ditentukan oleh situasi temporer, akan tetapi mempunyai pola yang berorientasi pada pola umum yang nampak jelas sebagai pencerminan budaya politik yang sering kali disebut sebagai peradaban politik. Jadi perilaku politik tumbuh atas dasar kesadaran yang mendalam tentang sistem politik yang berlaku atau ideologi politik suatu negara ( Budiarjo, 1982 :135 ).

Pokok politik yang disampaikan yang disampaikan oleh kaum “ *behavioralisme*” adalah tentang pendekatan perilaku dari segi tingkah laku dengan konsep pemikiran sbb :

1. Tingkah laku politik memperlihatkan kesatuan integritas yang dirumuskan dalam generalisasi.
2. Generalisasi – generalisasi pada dasarnya harus dapat dibuktikan/ verification kebenarannya dengan menunjukkan tingkah laku yang relevan.
3. Untuk mengumpulkan, menafsirkan data diperlukan tehnik penelitian yang cermat.
4. Untuk mencapai kecermatan dalam penelitian sedapat mungkin tidak main peran ( *value free* )
5. Penelitian politik mempunyai sikap terbuka terhadap konsep-konsep teori dan ilmu sosial lainnya.
6. Dalam membuat analisis politik nilai-nilai pribadi si peneliti sedapat mungkin tidak main peran ( *Value free* ) Budiharjo. 1982:136)

Berdasarkan uraian tersebut diatas, perilaku politik dalam penelitian ini adalah perilaku politik pemilih yakni aktivitas-aktivitas sosial politik pemilih dalam memberi politik pilihannya ketika diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung di Madiun periode 2013-2018. Perilaku politik yang dimaksud peneliti bahwa perilaku politik yaitu aktifitas politik meliputi keseluruhan tingkah laku politik para aktor politik warga negara / masyarakat yang dalam manifestasi konkritnya telah saling memiliki hubungan dengan kultur politiknya atau budaya politik masyarakatnya. Tingkah laku warga masyarakatnya. respon dalam menilai obyek dan peristiwa politik maupun model perilaku politiknya terhadap sistem politik yang ada.

## **2. Pendekatan Politik Pemilih.**

Salah satu wujud perilaku politik adalah berarti suatu kegiatan yang berkenaan dengan proses dan pelaksanaan keputusan politik dan melakukan kegiatan tersebut adalah ialah pemerintah dan masyarakat. Warga negara tidak memiliki fungsi menjalankan jalannya pemerintahan tetapi memiliki hak untuk mempengaruhi orang yang menjalankan fungsi pemerintahan. ( Budiharjo,1981). Salah satu wujud dari perilaku sosial dalam kehidupan masyarakat adalah perilaku politik sebagai perilaku yang bersangkutan paut dengan proses politik, untuk membedakannya dari perilaku sosial ekonomi, keluarga, agama dan budaya.

Sedangkan politik adalah interaksi antara pemilih dengan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah, (Surbakti,1992). Menurut Popkin ada empat yang membedakan perilaku politik pertama memilih kandidat politik tidak langsung dirasakan oleh manfaatnya sebagaimana pilihan terhadap produk konsumtif, manfaat nya dirasakan diperoleh masa depan, kedua pilihan politik merupakan tindakan kolektif, dimana kemenangan dirasakan oleh pemilik suara terbanyak, sehingga pilihan seseorang senantiasa mempertimbangkan pilihan orang lain. Pilihan politik senantiasa dihadapkan dengan ketidakpastian utamanya politisi untuk memenuhi janji politiknya dan keempat pilihan politik membutuhkan informasi yang intensif demi terciptanya manfaat di masa depannya. Memberikan suara adalah salah satu tindakan sosial dalam proses pemilihan kepala daerah, dimana pemilih banyak mempertimbangkan dalam menetapkan keputusan Mereka. Yang menetapkan tipe pemilih menjadi dua tipe karakter yaitu pemilih introvert Dan pemilih ekstrovert. Pemilih introvert berbalik kepada diri manusia itu sendiri sedang pemilih ekstrovert berminat terhadap sesuatu yang ada disekitarnya, dalam kekayaan dan Prestise, persetujuan sosial, dan konfprmitas. (nimmo, 2001).

Secara umum Nimmo memberi pendapatnya tentang pemberian suara pada empat alternatif tindakan yakni :

- a. Pemberian suara rasional, tindakan pemberian suara yang rasional memperhitungkan cara atau alat yang tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pemberian suara yang rasional selalu dimotivasi untuk bertindak jika berhadapan pada pihak politik. Disamping itu pemberian suara rasional berminat secara aktif terhadap politik sehingga memperoleh informasi. Pemilih rasional cukup berpengatahuan tentang berbagai alternatif bertindak berdasarkan prinsip bukan kebetulan, atau kebiasaan melainkan berdasar standart yang tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan umum. Pemilih profesional memilih alternatif yang peringkat preferensinya tinggi.
- b. Pemberian suara reaktif, yaitu pemberi suara bersumber dari asumsi fisikalistik bahwa manusia bereaksi terhadap rangsangan dengan cara pasif dan terkondisi terhadap kampanye politik oleh partai dan kandidat yang menyajikan isyarat dengan maksud menggerakkan arah perilaku dalam memberikan suara. (Nimmo,2001). Ikatan emosional kepada partai politik merupakan konstruksi yang paling utama yang menghubungkan pengaruh sosial dengan pemberian suara bagi pemilih.( swanson dalam Nimmo :2001)
- c. Pemberian suara responsif, pemberian suara yang responsif adalah permanen berubah mengikuti waktu, peristiwa. Politik dan pengaruhnya yang berubah ubah terhadap pilihan pemberi suara. Pomper menjelaskan perbedaan pemberi suara responsif dan pemberi suara reaktif : Pemberi suara yang responsif dipengaruhi oleh karakter sosial dan demografis mereka, pengaruh yang pada hakekatnya merupakan atribut yang permanent tidak deterministik. (2) Pemberian suara responsif memiliki kesetiaan pada partai, tetapi afiliasi ini tidak menentukan perilaku pemilihan karena ikatan pemilihan kepada partai tidak emosional. Pemberian suara yang lebih responsif lebih dipengaruhi oleh faktor-

faktor jangka pendek yang penting dalam pemilu, ketimbang kesetiaan jangka panjang kepada kelompok atau partai.

- d. Pemberian suara aktif. Manusia bertindak pada suatu obyek yang dilihatnya memberi makna dan menggunakan makna itu untuk mengarahkan tindakannya. (Blummer dalam Nimmo, 2001). Dengan demikian, individu yang aktif itu menghadapi dunia yang harus diinterpretasikan dan diberi makna untuk bertindak bukan hanya lingkungan pilihan yang telah diatur sebelumnya terhadap orang yang menanggapi karena sifat atribut dan sikap individu atau atau jangkauan rangsangan yang terbatas. (Casey dalam Nimmo, 2001). Oleh karena itu rangsangan atau pilihan yang diberikan kepada pemberi suara dalam kampanye politik tidak lagi tetap atau terbagi merata keseluruhan pemilih ketimbang atribut sosial dan kecenderungan pemilih. (Blummer dalam Nimmo, 2001). Keterlibatan aktif mencakup orang yang menginterpretasikan peristiwa, isu, partai, dan personalitas dengan demikian menetapkan dan menyusun, menerima serangkaian pilihan yang diberikan.

### **3. Inovasi metode dan Konsepsi pemilihan kepala daerah langsung dalam pemilihan umum.**

Realisasi pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah merupakan tonggak baru penataan pemerintahan daerah di Indonesia. Sebab UU tersebut memiliki filosofi, paradigma yang berbeda dengan UU sebelumnya. UU No 5/1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, menggunakan filosofi keseragaman dalam kesatuan, maka UU No 22/99 menggunakan filosofi keanekaragaman dalam kesatuan. UU tersebut direvisi melalui UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang semakin tegas dan jelas orientasi tujuan dan arah desentralisasi pemerintahan.

Dalam pemerintahan, format otonomi daerah difahami sebagai hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri secara berbeda. Pertama otonom bersumber dari pemerintahan yang lebih tinggi, berupa limpahan kewenangan tertentu kepada pemerintah yang lebih rendah. Kedua otonomi bersumber dari kondisi sosial budaya masyarakat daerah berupa nilai, kemampuan dan pranata sosial yang lebih lama melekat pada praktek pengaturan tata kehidupan masyarakat dan pemerintahan yang lebih tinggi yang disebut otonomi bawaan. Penyebutan daerah mempunyai otonomi daerah, adalah merupakan kebebasan luas untuk mengatur dan mengurus daerahnya termasuk menata kewenangan mengatur kelembagaan merupakan inti dari desentralisasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus areal masyarakat tertentu berdasar masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat dalam ikatan NKRI (UU Nomor 32 tahun 2004).

Secara keseluruhan pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan, telah memposisikan kembali status keberadaan rakyat sebagai pemegang kuasa pemangku kedaulatan tertinggi, terutama melalui desentralisasi dan sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Pemilihan eksekutif di daerah secara langsung oleh masyarakat, diatur dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pilkada daerah, PP Nomor 6 tahun 2005 pemilihan, pengesahan,



pemberhentian kepala daerah dan wakil. Kemudian dilengkapi dengan perpu nomor 3 tahun 2005 dan disempurnakan dalam PP nomor 17 tahun 2005 sebagai penyempurna. Dimensi ketiga dari perubahan paradigma otonomi daerah adalah masyarakat daerah otonomi memiliki kewenangan yang besar untuk menentukan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk didalamnya dimensi efisien dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, merupakan bagian yang masih sulit untuk segera direalisasikan, selain karena pemerintah sendiri dapat segera menemukan mekanisme prosedur yang relevan kontekstual. Pemerintah di daerah sendiri masih berperan, berfungsi, bertindak sebagai penguasa bukannya sebagai pelayanan masyarakat.

Perubahan paradigma penyelenggara pemerintahan, pada dasarnya adalah adanya pilkada kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh masyarakat. Pilkada sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah NKRI berdasarkan UUD 45 dan Pancasila untuk memilih kepala dan wakil kepala daerah dengan tahapan-tahapab sbb : a. penetapan pemilih. b) pendaftaran pemilih. c) penelitian pasangan calon.d) penetapan dan pengumuman calon.e) pelaksanaan kampanye. g) bentuk, variasi kampanye. h) larangan kampanye. i) dana kampanye. j ) pemungutan dan perhitungan suara. k) penetapan calon. l) pengesahan dan pengangkatan dan pelantikan calon. Tahapan dalam PP Nomor 6 tahun 2005 sebagai acuan dalam memberikan gambaran terhadap proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Penulisan ini bertitik tolak pada asumsi bahwa memberikan suara atau tidak pada pilkada secara langsung sebagai bentuk visualisasi perilaku politik pemilih senantiasa didasarkan pada pertimbangan subyektif. Sehingga perilaku sosial atau tindakan sosial seseorang mengandung makna yang mendalam, berdampak berbeda pada setiap individu. Karena itu perilaku politik pemilih sangat variatif dan membutuhkan beberapa motivasi sosial politik yang berlainan pada setiap perilaku sosial.

Paradigma fakta sosial, melihat bahwa perilaku pemilih seseorang dientuk oleh faktor eksternal yang sifatnya memaksa dan mengendalikan individu. Sementara paradigma sosial politik menekankan pada tindakan orang atas dasar pada makna subyektif. Perilaku politik pemilih akan berulang ketika mendapat ganjaran yang diharapkan, sebaliknya perilaku politik tidak berulang pada orang, melahirkan hukuman yang lebih besar dari pada hadiahnya. Perulangan pemberi suara sangat tergantung pada perulangan atau kesamaan stimulus politik yang diperoleh dimasa lalu sebagaimana yang dimaksud pada teori pertukaran.

Perilaku politik pemilih merupakan realitas sosial politik yang tidak terlepas dari pengaruh faktor eksternal, faktor internal. Secara eksternal perilaku politik merupakan hasil dari sosialisasi nilai-nilai dari lingkungannya dalam *behavior* disebut sebagai faktor stimulus. Sedangkan secara internal merupakan tindakan yang didasarkan rasionalisasi berdasarkan pengetahuan, pengalaman yang dimiliki. Beberapa variabel dalam penelitian ini sebagai stimulus yang dapat mempengaruhi perilaku politik pemilih pada pemilihan kepala daerah. Yaitu : figur kandidat, identifikasi partai politik pendukung, isue kampanye, tim sukses

kelompok penekan lainnya. Oleh karena itu perilaku politik pemilih dipandang memiliki tujuan, maka pemilih dalam merespon berbagai stimulus pemilih dapat mempengaruhi perilaku politik melewati beberapa proses mulai dari pengetahuan sampai pada perilaku politik pemilih.

Penelitian yang dilakukan penulis adalah Perilaku politik pemilih pada pemilihan kepala daerah secara langsung Kota Madiun periode 2013-2018. Fenomena sosial politik yang terjadi sesungguhnya elite-elite politik selalu memanfaatkan potensi konflik, chaos. Padahal memanipulasi, memobilisasi masa konflik untuk mencapai ambisi para petualang politik menciderai semangat di masa era otonomi daerah dan tidak sesuai dengan maksud serta semangat UUNo 22/1999 tentang otonomi daerah. Peranan teori sangat penting, dalam penelitian kualitatif, teori digunakan untuk memahami, menjelaskan, atau memprediksi masalah tertentu sehingga sejauh teori yang digunakan baik dan sesuai dengan keadaan, peneliti berhasil memberikan gambaran atau prediksi tentang masalah yang terjadi dengan menggunakan teori yang berhubungan dengan penelitian. Teori yang berhubungan dengan obyek penelitian adalah sbb : a) Teori tindakan sosial. b) Teori Perilaku (*behavioral*) c) Teori Konstruksi Sosial (*social konstruk*).

#### b) Teori Tindakan sosial

Teori tindakan sosial digunakan oleh penulis untuk menganalisis perilaku politik pemilih. Perilaku politik pemilih sebagai tindakan sosial merupakan suatu proses yang dimana aktor terlibat dalam pengambilan-pengambilan keputusan subyektif tentang sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dipilih, tindakan tersebut setiap jenis perilaku manusia, yang penuh arti di orientasikan pada perilaku orang lain. Menurut Weber, tindakan sosial adalah tindakan yang mempunyai makna subyektif bagi dan dari aktor pelakunya. (Johnson, 1986). Tindakan-tindakan sosial untuk mencapai harapan-harapan dalam aktifitas sosial politik, tindakan yang didasari oleh kesadaran keyakinan mengenai nilai-nilai (wert) seperti etika, estetika, agama dan nilai-nilai lainnya yang dapat mempengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupannya, tindakan yang ditentukan oleh kondisi kejiwaan dan perasaan aktor yang melakukannya. Dan tindakan yang didasarkan kebiasaan-kebiasaan yang telah mendarah daging (Johnson, 1986)

#### c) Teori Perilaku (Behavioral theory)

Menurut Blau, pertukaran perilaku merupakan dasar dari bagian Besar hubungan –hubungan sosial, akan tetapi terdapat perbedaan yang mendasar diantara pertukaran seperti terdapat dalam organisasi sosial yang kompleks. Walaupun teori pertukaran perilaku sosial Blau tersebut sangat relevan dengan fungsionalisme struktural, akan tetapi lebih memperhatikan fenomena perubahan sosial dari pada fungsionalisme klasik, Blau menunjuk empat komponen atau dimensi perubahan perilaku sosial dari lapangan reduksionisme psikologis dan menempatkan dalam lapangan sosiologis yang dapat digunakan sebagai dasar bahas “pertukaran perilaku dan kekuasaan dalam organisasi

–organisasi besar” tetapi teorinya berlandaskan premis bahwa perilaku manusia ditentukan oleh pertukaran.

Pendekatan behavioral terhadap analisis politik dan sosial berkonsentrasi pada satu pertanyaan tunggal, mengapa orang berkelakuan sebagaimana yang mereka yang membedakan behavioris dengan ilmuwan adalah ilmu sosial adalah bahwa : a) perilaku yang dapat diteliti (observer behavior) apakah itu pada tingkat individu atau kumpulan sosial, harus menjadi fokus analisis. b) penjelasan tentang apapun tentang perilaku harus mudah diuji secara empiris. Behavioris secara mendalam menganalisis alasan yang mendasari bentuk utama partisipasi politik massa di negara demokratis.

Behavioralis secara mendalam menganalisis alasan yang mendasar bentuk utama partisipasi politik massa di negara demokratis. Pada tingkat elite politik, Ahli behavioral telah menganalisis perilaku kepemimpinan, menempatkan perhatian khusus pada hubungan cara pemimpin memandang dunia dan tindakan tertentu yang dapat mereka ketahui mengambil tindakan tersebut.

#### D. Metode Penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan subyek penelitian, pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap sebagai sumber data primer Sedangkan sumber data sekunder yakni, akademisi, guru, dosen, LSM, rektor, tokoh masyarakat.

Teknik pengambilan data dengan menggunakan tehnik wawancara mendalam (indepth interview), observasi, dan dokumentasi dengan *snowball method*.

Wawancara yang dilakukan akan dihentikan bila telah mencapai titik jenuh dari subyek yang diteliti maksudnya jawaban sama.

Pengolahan dan analisa data dalam penelitian ini dengan menggunakan teori Miles dan Huberman dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Pengumpulan data. 2) Reduksi data / Data Reduction. 3) Penyajian data / Display data. 3) Conclusion / Penarikan kesimpulan.

#### D. Hasil pemungutan Suara pada pilkada di kota Madiun

Pemilihan Umum kepala daerah di kota Madiun telah dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2013, berlangsung dengan langsung Umum Bebas dan Rahasia (LUBER). Jumlah pemilih pada pilkada kota Madiun sejumlah 146.634 pemilih. yang tersebar di 3 kecamatan yakni kecamatan Taman , kecamatan Kartoharjo dan kecamatan Manguhajo. Kegiatan kampanye pilkada dimulai sejak tanggal 12 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2013 dengan berbagai kegiatan

mulai dari pawai terbuka, debat kandidat, pemasangan alat peraga kampanye, dengan waktu kampanye 2 hari untuk masing-masing kandidat calon walikota/ wawalikota.

Hasil pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dihadiri oleh anggota KPU. Panwaslu, saksi pasangan walikota, sebagai berikut : Baris 49% , Pari 32%, Top-Care 2.5%, ARH 1.95%. Awan 19.6,9%, Murni 7% dengan kemenangan pada pasangan Baris yang diusung oleh partai demokrat. Kemenangan pasangan Baris yang merupakan incumbent mengindikasikan bahwa kekuatan modal sosial dan modal ekonomi kandidat calon memberikan faktor yang menentukan dalam pilkada 2013. Sedangkan pasangan Pari yang didukung oleh PDI.P dan di usung oleh mantan walikota sebelumnya (Kokok Raya) memperoleh suara cukup besar 33 % dibanding kandidat dari calon lainnya yang hanya dapat suara dibawah 10% dari pemilih. Hal tersebut menunjukkan bahwa modal sosial dan ekonomi seorang calon walikota memegang peran penting kemenangan calon kandidat sebagai pimpinan.

## E. PENUTUP.

### 1.Kesimpulan.

- a. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan wujud pelaksanaan demokrasi Pancasila, dan sebagai implementasi dari UUD 1945 dan UU No 32 2009 tentang pemerintahan daerah. Pilkada langsung ke 2 saat ini merupakan sarana demokrasi dalam memilih seorang kepala daerah di kota Madiun.
- b. Modal sosial dan modal ekonomi seorang calon merupakan faktor yang menentukan kemenangan dalam pilkada, seperti dalam pilkada di kota Madiun dimana calon yang memiliki modal ekonomi dan modal sosial kuat memperoleh suara yang signifikan. Sedangkan yang modal sosial dan modal ekonomi kecil hanya mendapat suara dibawah 10 %.
- c. Preferensi politik pemilih dalam pilkada di kota Madiun dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain : identifikasi figure calon, identifikasi ideologi partai, materi kampanye, program partai, agama, issue-issue aktual, modal sosial dan modal ekonomi calon.

### 2.Saran.

- a. Jadwal kampanye hendaknya ditaati oleh semua pihak, tidak boleh menggunakan fasilitas pemerintah dan mencuri start pelaksanaan kampanye. KPUD dan Panwas pilkada pro aktif mengawasi pilkada dengan sebaik-baiknya.
- b. Modal ekonomi/ keuangan calon kandidat hendaknya dibatasi dan dibuka secara transparan sehingga dapat diketahui masyarakat. Dalam pilkada 2013 terjadi ketidak seimbangan modal ekonomi calon yang menimbulkan adanya dugaan politik uang oleh kandidat calon.

F. Daftar Pustaka.

- Adrianus, Toni, Elferiza dan Kemal Fasyah, 2006 *Mengenai teori-teori Politik Dari system Politik sampai Korupsi*, Bandung Penerbit Nusansa.
- Agustino. Leo, 2007 *Perihal Ilmu Politik, Sebuah bahasan memahami Ilmu Politik*, Jakarta Graha Ilmu, Cet. Pertama.
- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktisi* Jakarta. Penerbit Rineka Cipta.
- Asfar Muhamad, 1995 *Pemilihan Umum dan Perilaku Politik*, 2004 Surabaya Pustaka Eurike.
- Berger PL and Lukman, T, 1985 *Humanisme Sosiologi*. Cetakan pertama Diterjemahkan oleh Dhanial Dakhidei Jakarta, Penerbit LPES
- Biro Pusat Statistik Kota Madiun, tahun 2012 *Madiun dalam Angka*
- Blau, Peter 1964 *Approaches to study of social structure*, New York The Free Press.
- Blau. Peter, 1964 *Approach to the study of scholl struture*, New York, The Free Pers.
- Bogdan R.C. dan Bigden S,K. 1982, *Qualitateif Researc for Education An Introduction to Theory and Methode*, Boston Alyn and Bacon.
- Bottomore Tom, 1992, *Sosiologi Politik* Jakarta Rineka Cipta.
- Bradley H. *Fracture Identity: Canging Pateerns of Innequenalily* Cambridge , Polity.
- Budiarjo, M *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Balai Pustaka. 2004.
- Cosser, Lewis. 1964 *The Fuction of Social Conflik*, New York Amerika Serikat The Free Pers.
- Dahrendorf, Ralph 1959, *Class and conflic and class conflik in dindustrial Sociaty* , Inggris Stanford.
- Denzin , Easton ( 1971 ) *Political System*, New York, Alfred A. Knop.
- Gaffar Affan, 2004 *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, Jakarta, Penerbit Pustaka Pelajar.
- George Ritzer (1975) *Perkembangan Sosilogi dari Klasik sampai Post Modern* Penerbit Obor Indonesia 2005.
- Hamidi 2008, *Metode Penelitian Kulaitatif. Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan laporan penelitian*. Penerbit Universitas Muhamadiyah Malang Pers.
- Harrison Lisa, 2009 *Metodologi Penelitian Politik*, Jakrta, Kencana Prenada Media Group Cetakan Kedua.
- Huberman A, Micheil and Matheu Miles, 1992, *Analisis Data Kualitatif*. UII Pers Jakarta.
- Surbakti, Ramlan, 1993, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta, Penerbit Gramedia Jakarta.



**SOSIALISASI**

**PASANGAN CALON**  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
DALAM PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN  
TAHUN 2013

<b>1</b>  Dr. KHARIFUDIN	<b>2</b>  DR. H. DARI, S.P.	<b>3</b>  H. A. NOL, S.H.
<b>4</b>  H. HUSNAN, S.H.	<b>5</b>  H. DARUL, S.H.	<b>6</b>  H. MUBIN, S.H.

**KONTESTAN PILKADA:**  
Malam ini, enam pasangan  
cawali-cawawali Kota Madiun  
akan mengikuti debat  
kandidat di Wisma Haji.

Proses Sosialisasi Dalam Pilkada Tanggal 29 Agustus 2013 Oleh Kandidat Calon Walikota





Proses Pencoblosan Suara Dalam Pilkada Tanggal 29 Agustus 2013 Oleh Kandidat Calon Walikota

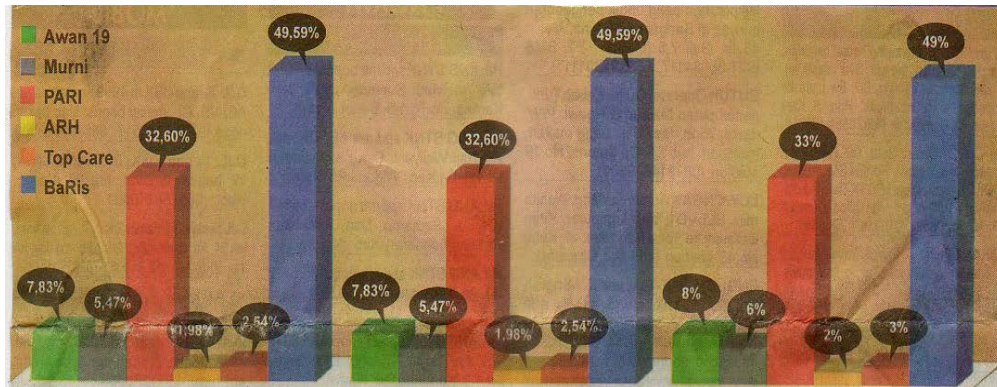


Peragaan Pencoblosan Kartu Suara Dalam Kampanye





Calon Kandidat Walikota Dalam Pilkada 2013 Kota Madiun



Grafik Rekapitulasi Hasil Pilkada 2013 Kota Madiun



Proses Penghitungan Suara Pilkada Walikota Madiun Tahun 2013





Kampanye Dalam Rangka Pilkada Walikota Madiun Tahun 2013  
Yang Dihadiri oleh Megawat dan Joko Wi